

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Koperasi dan UKM mengeluarkan data mengenai jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini ada sebanyak 64,2 juta. UMKM memiliki daya serap tenaga kerja sebanyak 117 juta pekerja atau sekitar 89%. UMKM sendiri memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian di Indonesia karena UMKM terbukti dapat menghadapi krisis ekonomi. Transaksi pada UMKM memiliki perputaran yang cepat menggunakan kebutuhan domestik dan kebutuhan primer yang dibutuhkan masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir pemerintah akan menetapkan usaha mikro menjadi usaha menengah. (Junaidi, 2024).

Peranan UMKM sangat besar bagi Indonesia, sehingga terjadi peningkatan setiap tahunnya, salah satunya terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Pada UMKM di Provinsi Jawa Tengah telah terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang baik, dari segi aspek kualitas dan kuantitasnya, sehingga hal ini menunjukkan banyaknya berbagai macam produk yang akan dihasilkan oleh UMKM. Berikut tabel UMKM berdasarkan Binaan di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan pada tahun 2020 sampai 2022.

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah

No	Deskripsi Data	Satuan	2020	2021	2022
1	Jumlah UMKM	Unit	167.391	173.431	177.256
	Produksi/Non Pertanian	Unit	57.527	60.449	63.311
	Pertanian	Unit	27.653	28.284	28.357
	Perdagangan	Unit	62.083	63.965	64.707
	Jasa	Unit	20.128	20.733	20.881
2	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	1.298.007	1.311.015	1.320.953
3	Aset	Rp. Milyar	38.353	38.521	38.719
4	Omzet	Rp. Milyar	67.087	68.242	68.387

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.

Pada data diatas, tahun 2022 tercatat sebanyak 177.256 unit UMKM di Jawa Tengah, peningkatan jumlah tersebut dapat memperluas dan membuka lapangan pekerjaan untuk para usia produktif yang berada di Jawa Tengah. Dapat dilihat pada tabel 1.1 diatas bahwa terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berarti UMKM dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran.

Perkembangan UMKM di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh 35 Kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Sukoharjo yang memiliki banyak pelaku usaha mikro kecil yang tersebar di 12 kecamatan. Dilansir dari harianmerapi.com, Iwan Setiyono selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Sukoharjo mengatakan UMKM Sukoharjo saat ini mencapai 110 ribu sampai 120 ribu pelaku usaha. Salah satu jenis UMKM yang dengan mudah dijumpai adalah toko kelontong. Toko kelontong ialah bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan karena bisnis tersebut menyediakan berbagai jenis kebutuhan pelanggan sehingga bisnis ini tidak akan mudah ditinggalkan oleh pelanggan. Toko kelontong makin berkembang di beberapa daerah, salah satunya di Kecamatan Sukoharjo. Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten

Sukoharjo tahun 2021, jumlah penjual toko kelontong di Kecamatan Sukoharjo mencapai 294 unit usaha.

Menurut sumber data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sukoharjo omzet tahunan toko kelontong memiliki rata-rata sebesar 100 juta rupiah per tahunnya dengan laba 25 juta rupiah. Usaha toko kelontong membawa dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia, maka untuk mempertahankan kinerja usaha tersebut, toko kelontong harus dapat melakukan inovasi bisnis.

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu pelaku usaha toko kelontong yang ada di Sukoharjo disimpulkan bahwa dalam menjalankan usaha tersebut tidak menerapkan SAK EMKM karena kurangnya pengetahuan dan tidak adanya sosialisasi yang dapat membantu untuk mengetahui hal tersebut. Dengan adanya kendala yang dialami para pelaku usaha toko kelontong maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut.

Dalam pelaksanaan UMKM pasti menghadapi banyak tantangan kedepannya. Usaha toko kelontong tidak lepas dari masalah yang dapat menjadi tantangan tersebut. Banyak yang menjadi faktor masalah pada usaha toko kelontong salah satunya mengenai pencatatan keuangan. Masalah yang masih terjadi ialah sering tidak memperhatikan pencatatan keuangan atas usahanya karena pelaku UMKM menganggap pencatatan tersebut sulit dan merepotkan. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan akuntansi, yang disebabkan oleh latar belakang tingkat pendidikan pelaku UMKM yang *basic* nya bukan akuntansi sehingga minim pengetahuan akuntansinya.

Pencatatan keuangan dengan penerapan sesuai SAK EMKM telah dipermudah dan disederhanakan agar pelaku bisnis dapat menerapkan dengan mudah dalam laporan keuangan mereka. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, pengetahuan akuntansi serta sosialisasi pemahaman SAK EMKM namun sering kali faktor tersebut belum terpenuhi karena pengetahuan akuntansi, sosialisasi yang belum merata serta tingkat pendidikan yang dapat mempengaruhi. Dengan kurangnya pengetahuan mengenai SAK EMKM tersebut, maka diperlukan sosialisasi SAK EMKM. Sosialisasi tersebut nantinya berkaitan dengan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pelaku UMKM terkait standar pada SAK EMKM.

Penelitian yang berhubungan dengan pengetahuan akuntansi dilakukan oleh Satiya *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan SAK EMKM. Sedangkan menurut Nurfadilah *et al.*, (2018) menyimpulkan bahwa pemahaman akuntansi rendah tidak berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Salmiah *et al.*, (2019) menunjukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM terhadap penerapan SAK EMKM. Sedangkan menurut Silvia & Azmi (2019) tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM terhadap penggunaan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Janrosi (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM. Sedangkan menurut Febriyanti & Wardhani (2018) sosialisasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang di uraikan di atas, menunjukkan masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait penerapan SAK EMKM sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Penerapan SAK EMKM Toko Kelontong di Kecamatan Sukoharjo”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disajikan sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM toko kelontong di Kecamatan Sukoharjo?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM toko kelontong di Kecamatan Sukoharjo?
3. Apakah sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan SAK EMKM toko kelontong di Kecamatan Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM toko kelontong di Kecamatan Sukoharjo
2. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penerapan SAK EMKM toko kelontong di Kecamatan Sukoharjo
3. Mengetahui apa pengaruh sosialisasi SAK EMKM terhadap penerapan SAK EMKM toko kelontong di Kecamatan Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dibidang akuntansi keuangan pada EMKM khususnya pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan akuntansi, tingkat pendidikan dan sosialisasi pada UMKM.

2. Manfaat Pratik

Penelitian ini akan memberikan manfaat praktis bagi :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis serta digunakan sebagai bahan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini bisa menjadikan wawasan terhadap pengelolaan laporan keuangan dengan menerapkan SAK EMKM dalam menjalankan kegiatan UMKM.